



ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD 2021

Disampaikan oleh:

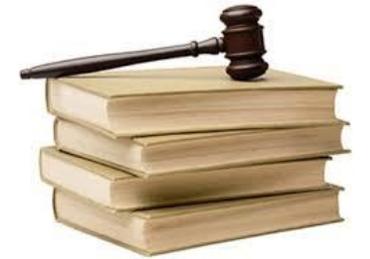
Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

Plh. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Jakarta, 10 Juni 2020



DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



1. **UU Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara
2. **UU Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara
3. **UU Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
4. **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah
5. **PP Nomor 17 Tahun 2017** Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
6. **PP Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. **Permendagri Nomor 59 Tahun 2007** tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
9. **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. **Permendagri Nomor 70 Tahun 2019** tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. **Permendagri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

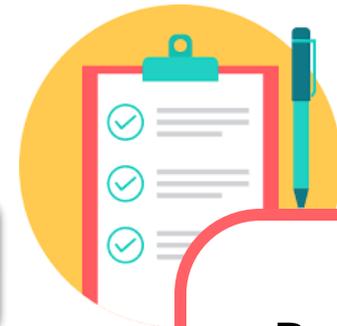


LATAR BELAKANG
PS. 75 & PS. 76 PERMENDAGRI 86/2017

RPJMD Provinsi
RKP
Program Strategis Nasional
Pedoman Penyusunan RKPD

dipedomani

Ranwal RKPD
Provinsi



Pedoman
penyusunan
RKPD
ditetapkan
melalui
Peraturan
Menteri

RPJMD Kabupaten/Kota
RKP
Program Strategis Nasional
Pedoman Penyusunan RKPD
Ranwal RKPD Provinsi

dipedomani

Ranwal RKPD
kab/kota



TUJUAN PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG PENYUSUNAN RKPD 2021



Sinergi dengan perencanaan nasional dan antar tingkatan pemerintahan

Konsisten dengan RPJMD

Selaras dengan Renstra PD dan Renja PD

Pedoman perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2021

Pengendalian dan Evaluasi RKPD dan Renja PD Tahun 2021

Tercapainya target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota

RANGKAIAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2021

Daerah

Pemerintah Pusat :

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian/Lembaga

HASIL SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH UNTUK Mendukung PN DAN MAJOR PROJECT

USULAN DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD 2021 YANG Mendukung:

1. Penyelenggaraan Kinerja Urusan
2. Indikator Makro
3. Prioritas Nasional dan Major Project
4. Pembangunan Kawasan Perbatasan

1. Usulan Daerah melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Surabaya, 3-6 Maret 2020 dan Bandung, 10-13 Maret 2020
2. Usulan Daerah melalui Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Jakarta, 3-4 Maret 2020
3. Usulan Baru: Maksimal 5 Usulan

Usulan Program dan Kegiatan Daerah yang mendukung PN dan Major Project

Rakor Gubernur Jakarta 3-4 Maret 2020

Kortekrenbang Wil I Surabaya 3-6 Maret 2020

Kortekrenbang Wil II Bandung 10-13 Maret 2020

Musrenbangnas 2020 Jakarta 30 April 2020

1. Usulan Program dan Kegiatan Daerah yang mendukung PN dan Major Project
2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Urusan
3. Sinkronisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Makro
4. Sinkronisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Pembangunan Kawasan Perbatasan

Sinkronisasi Perencanaan Daerah Dalam Mendukung Prioritas Nasional 2021

Pendalaman Major Project

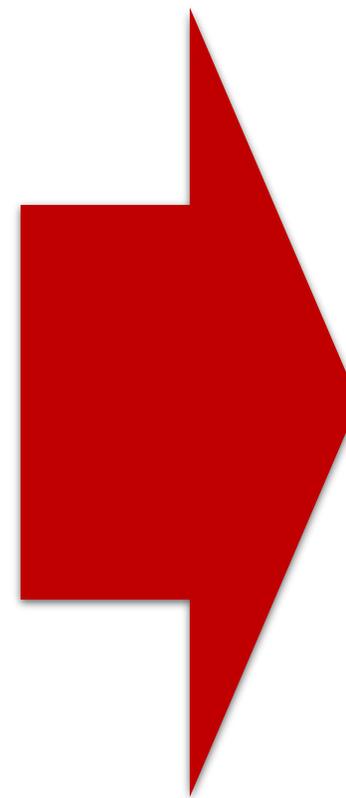
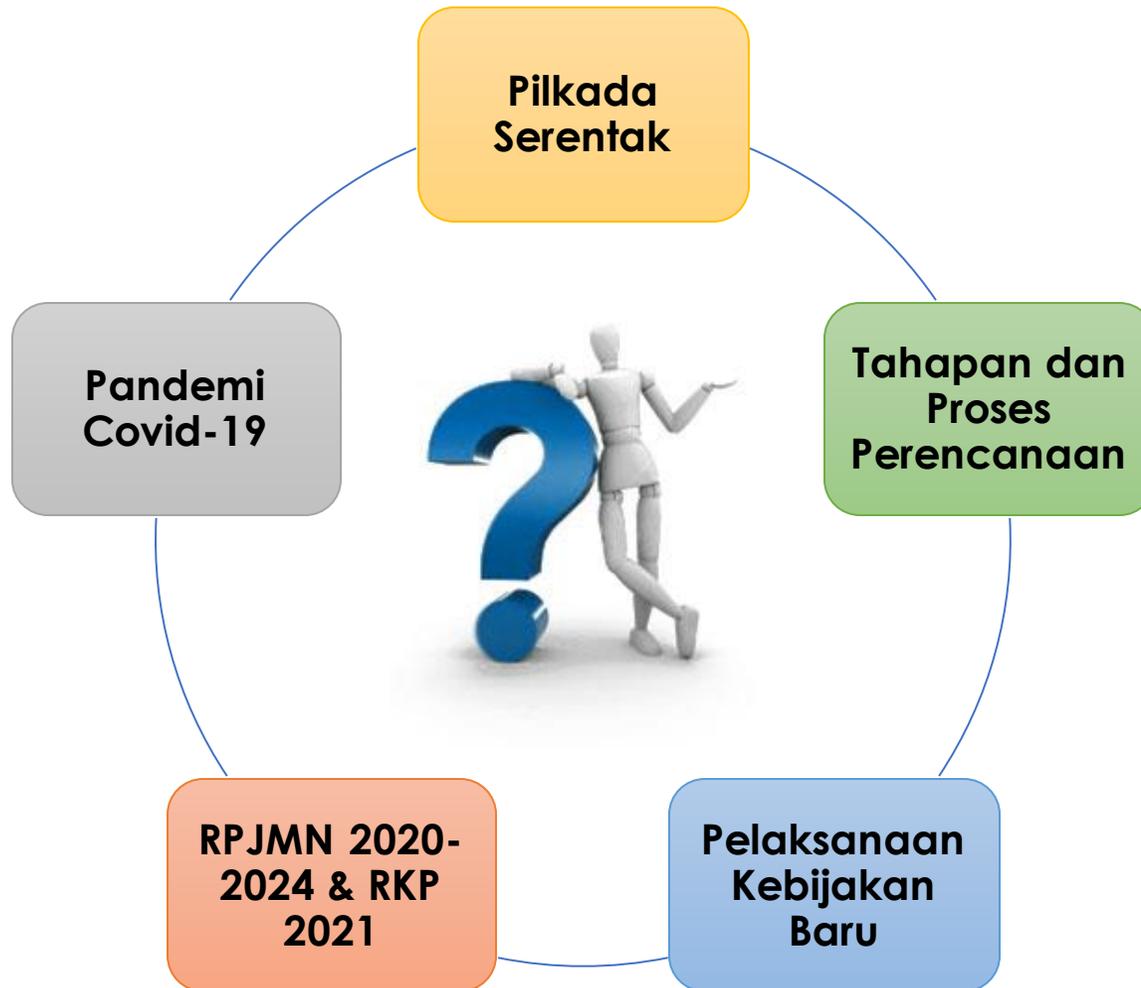
Usulan Baru Terbatas

1. 3.662 Program, 18.092 Kegiatan, serta pagu indikatif sebesar 86,6 T yang mendukung Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan;
2. Untuk Tingkat Provinsi:
 - Usulan Major Project (MP): 99
 - Usulan Prioritas Nasional (PN): 84
 - Usulan MP yang diakomodir: 40
 - Usulan PN yang diakomodir: 34
3. Untuk Tingkat Kab/Kota:
 - Usulan PN: 1.385
 - Usulan PN yang diakomodir: 219

Target kinerja urusan dan usulan provinsi dimungkinkan untuk disesuaikan karena pertimbangan pandemik Covid-19



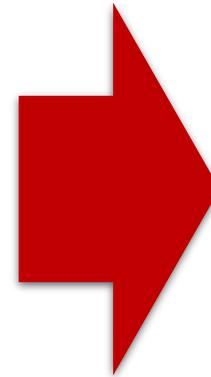
ISU PENYUSUNAN RKPD 2021



Pemerintah Daerah memerlukan kebijakan yang jelas sebagai dasar hukum proses perencanaan dan penganggaran TA 2021



**RUANG
LINGKUP
PERMENDAGRI
TENTANG
PENYUSUNAN
RKPD 2021**



**Penyusunan RKPD dan
RKPD-P 2021**

**Pengendalian dan
Evaluasi RKPD 2020**

LAMPIRAN

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
Prioritas Pembangunan Nasional
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan
Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran
Format Fasilitasi Ran-Perkada RKPD 2021





PERMENDAGRI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021

Tema RKP Tahun 2021

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Arah Pembangunan RKP 2021:

- **Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;**
- **Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;**
- **Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;**
- **Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.**

SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN RKP 2021

- Pertumbuhan **ekonomi** nasional berkisar **4,5-5,5%**
- Tingkat **inflasi** secara nasional berkisar antara **3,0%**
- Sasaran tingkat **kemiskinan** pada kisaran **9,2 – 9,7%**
- **IPM** menjadi **72,78-72,90**
- **Gini rasio** pada kisaran **0,377 – 0,379**
- Tingkat **pengangguran terbuka** **7,5-8,2%**

Kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Sumatera 3,9-5,1% | <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara 3,5-5,2% |
| <input type="checkbox"/> Jawa-Bali 4,8-5,5% | <input type="checkbox"/> Maluku 5,2-6,2% |
| <input type="checkbox"/> Kalimantan 3,6-5,7% | <input type="checkbox"/> Papua 2,6-5,8% |
| <input type="checkbox"/> Sulawesi 5,4-7,0% | |





PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

5 Arahan Utama Presiden



1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



7 (TUJUH) AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2021



1. Memperkuat **Ketahanan Ekonomi** untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. **Mengembangkan Wilayah** untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia** yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
5. **Memperkuat Infrastruktur** untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**



STRUKTUR
DRAFT PERMENDAGRI TTG PENYUSUNAN RKPD 2021

4 BAB &
11 Pasal



BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II RKPD TAHUN 2021

BAB III PEMETAAN DAN PEMUTAHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

III. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

V. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

VI. FORMAT FASILITASI RANCANGAN PERKADA RKPD 2021



DRAFT
PERMENDAGRI TTG PENYUSUNAN RKPD 2021

Mempedomani

- RPJMD
- RKP 2021
- Program Strategis Nasional (PSN)

RKPD 2021

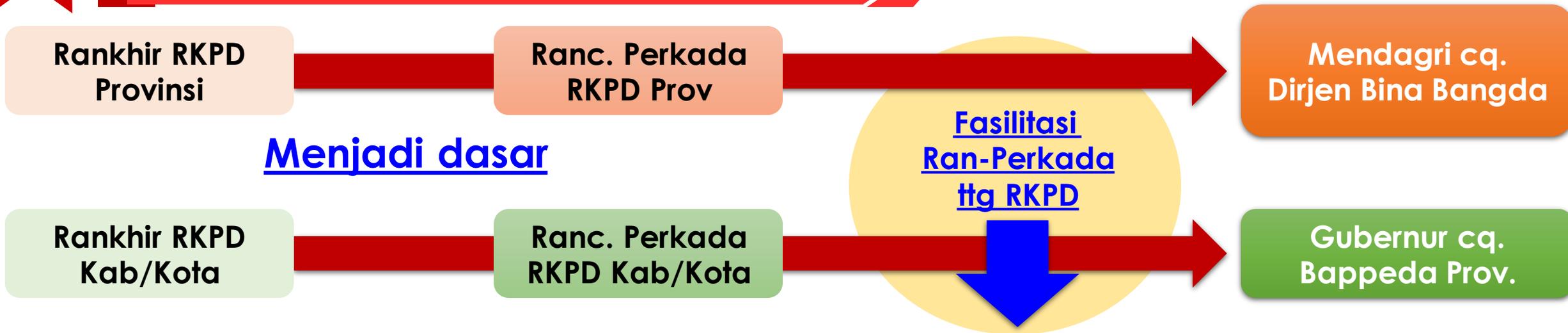


Memuat :

- a) rancangan kerangka **ekonomi daerah**;
- b) **prioritas pembangunan** daerah;
- c) **rencana kerja** dan **pendanaan** untuk batas waktu 1 (satu) tahun; dan
- d) **Kebijakan** penanganan Pandemi **Covid-19**
- e) **Urusan kesatuan bangsa dan politik** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah



DRAFT PERMENDAGRI TTG PENYUSUNAN RKPD 2021



- surat permohonan evaluasi** dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali Kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
- rancangan akhir RKPD**;
- berita acara **keepakatan Musrenbang RKPD**;
- hasil pengendalian dan evaluasi** perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
- gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan** antara RPJMD dan RKPD;
- hasil **reviu Aparat Pengawasan Internal (APIP)** Pemerintah Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- format isian fasilitasi RKPD Tahun 2021**.

Dalam penyampaian dokumen Ranc. Perkada maka Pemda berikut Lampiran yang harus dilengkapi Pemda.

DRAFT
PERMENDAGRI TTG PENYUSUNAN RKPD 2021



RKPD



**Bagaimana kalau RKP
belum ditetapkan?**

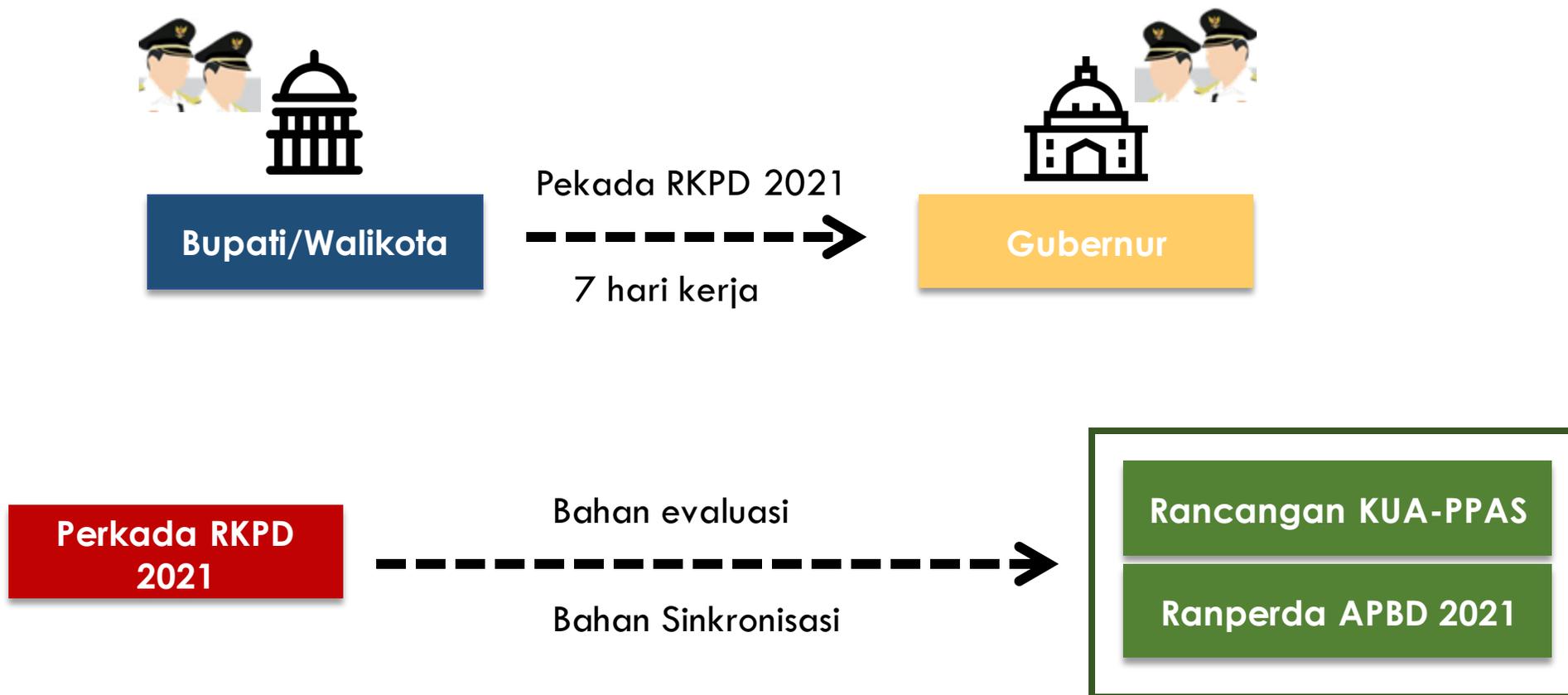
**Mengacu pada Ranc. RKP yang memuat Arah
Kebijakan Pembangunan Nasional 2021
sebagaimana dalam Lampiran Permendagri
Pedoman Peny. RKPD 2021**

**Bagaimana kalau RKP
belum ditetapkan
sampai Bulan Juni?**

**Gubernur dapat menetapkan RKPD Provinsi paling
lama minggu ke-4 Bulan Juni dan
Bupati/Walikota menetapkan RKPD kab/kota
1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi**

**RKPD Prov → Mendagri cq. Dirjen Bina Bangda
RKPD kab/kota → Gubernur cq. Bappeda Prov
(paling lama 7 (tujuh) hari kerja stlh ditetapkan)**

Bupati/WaliKota menyampaikan peraturan Bupati/ WaliKota mengenai **RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak peraturan bupati/wali Kota **ditetapkan**.



Penyampaian RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **digunakan** sebagai bahan **evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS** dan bahan **sinkronisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2021**.

DRAFT
PERMENDAGRI TTG PENYUSUNAN RKPD 2021

Kondisi Pemda yang hasil Pilkada 2018 & 2020 tidak terdapat KDH Terpilih

Kondisi Pemda yang sedang menyusun RPJMD

RKPD 2021



RKPD 2021 mempedomani:

a. Prov

- Arah kebijakan & sasaran Pokok RPJPD
- Prioritas Nasional dlm RKP
- RPJMD Provinsi
- Perda ttg Perangkat Daerah

b. Kab/Kota

- Arah kebijakan & sasaran Pokok RPJPD
- Prioritas Nasional dlm RKP
- RPJMD kab/kota
- Perda ttg Perangkat Daerah

RKPD 2021 mempedomani:

a. Prov

- Arah kebijakan & sasaran Pokok RPJPD
- Prioritas Nasional dlm RKP
- Perda ttg Perangkat Daerah
- Visi & misi KDH terpilih

b. Kab/Kota

- Arah kebijakan & sasaran Pokok RPJPD
- Prioritas Nasional dlm RKP
- Perda ttg Perangkat Daerah
- Visi & misi KDH terpilih



PROVINSI

Dalam hal daerah **Provinsi** hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan **RKPD Tahun 2021** mengacu pada:

- a. Arah kebijakan dan sasaran pokok **RPJPD**, program prioritas nasional dalam **RKP** untuk **RKPD Provinsi**
- b. Arah kebijakan dan sasaran pokok **RPJPD**, **RPJMD Provinsi**, program prioritas nasional dalam **RKP** untuk **RKPD Kabupaten/Kota** serta **Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah**

Dalam hal daerah **Kabupaten/Kota** yang hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan **RKPD Tahun 2021** mengacu pada:

- a. Arah kebijakan dan sasaran pokok **RPJPD**, program prioritas nasional dalam **RKP** untuk **RKPD Provinsi**
- b. Arah kebijakan dan sasaran pokok **RPJPD**, **RPJMD Provinsi**, program prioritas nasional dalam **RKP** untuk **RKPD Kabupaten/Kota** serta
- c. **Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah**



KAB/KOTA

Dalam hal daerah sedang melakukan proses penyusunan RPJMD sebagai hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada:

- a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP
- b. Peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah dan
- c. Visi, misi dan program kepala daerah terpilih

RKPD dijadikan sebagai satu kesatuan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021



Dalam hal daerah Kabupaten/Kota sedang melakukan proses penyusunan RPJMD, Penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada:

- a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD provinsi, program prioritas nasional dalam RKP
- b. Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah
- c. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.





PEMETAAN DAN PEMUTAHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Dalam Penyusunan Ranc. RKPD, Pemda juga melakukan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan Permendagri 90/2019

Pemda

Tidak merubah target & indikator dalam RPJMD

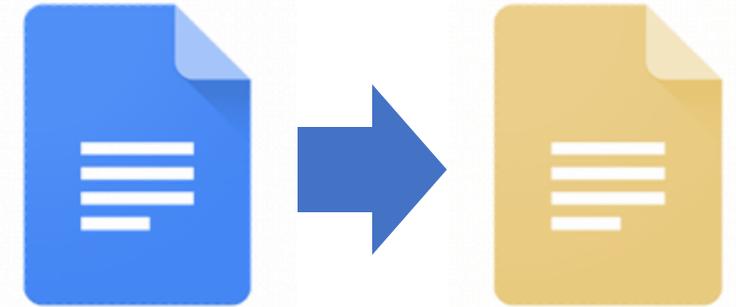


Hasil pemetaan dimuat dalam Berita Acara dan disampaikan Ketika Fasilitasi RKPD



PEMETAAN DAN PEMUTAHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

- (1) Pemerintah daerah **menyusun rancangan RKPD tahun 2021 juga melakukan pemetaan** program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kedefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) **Pemetaan tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD**
- (3) **Hasil pemetaan dituangkan dalam berita acara** hasil pemetaan dan disampaikan pada saat fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota
- (4) Pemerintah daerah melakukan input hasil pemetaan di SIPD sebagai bahan untuk pemutakhiran





ALUR PEMETAAN & PEMUTAKHIRAN



Hasil pemetaan **TELAH**
sesuai dgn
Permendagri 90/2019

Hasil pemetaan menjadi bagian **muatan** pada
Perkada tentang **RKPD**

Hasil pemetaan **BELUM**
sesuai dgn
Permendagri 90/2019

Pengusulan Pemutakhiran
Permendagri 90/2019 sesuai Per-UU

Proses **pemetaan dilanjutkan** s.d. dikeluarkannya **hasil pemutakhiran** Permendagri 90/2019

Hasil pemetaan menjadi bagian **muatan** pada
Perkada tentang **RKPD**



(1) Dalam hal proses pemetaan terdapat program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 yang **belum sesuai** dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, **dilakukan pemutahiran** klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

(2) **Pemutahiran** klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan **dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**





- (1) Bagi daerah yang tidak melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, **hasil pemetaan menjadi bagian muatan pada Perkada tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota**
- (2) Bagi daerah yang melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, **proses pemetaan program kegiatan dan sub kegiatan tetap dilanjutkan setelah pemutakhiran dilakukan**
- (3) Hasil pemetaan **menjadi bagian Lampiran Perkada tentang RKPD provinsi dan RKPD Kabupaten/kota**





ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai dengan **Tema RKP Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

- **Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;**
- **Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;**
- **Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;**
- **Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.**



Kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional:

- ❑ Sumatera **3,9-5,1%**
- ❑ Jawa-Bali **4,8-5,5%**
- ❑ Kalimantan **3,6-5,7%**
- ❑ Sulawesi **5,4-7,0%**
- ❑ Nusa Tenggara **3,5-5,2%**
- ❑ Maluku **5,2-6,2%**
- ❑ Papua **2,6-5,8%**

Sasaran dan target yang harus dicapai, antara lain:

- Pertumbuhan **ekonomi** nasional berkisar **4,5-5,5%**
- Tingkat **inflasi** secara nasional berkisar antara **3,0%**
- Sasaran tingkat **kemiskinan** pada kisaran **9,2 – 9,7%**
 - **IPM** menjadi **72,78-72,90**
 - **Gini rasio** pada kisaran **0,377 – 0,379**
- Tingkat **pengangguran terbuka** **7,5-8,2%**



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan Presiden, sebagai berikut:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia** yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis;
2. **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur**, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian;
3. **Menyederhanakan Regulasi** yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. **Menyederhanakan Birokrasi** melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi; dan
5. **Transformasi Ekonomi**, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.



5 (lima) arahan Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi** untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. **Mengembangkan Wilayah** untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia** yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
5. **Memperkuat Infrastruktur** untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. **Membangun Lingkungan Hidup**, Meningkatkan **Ketahanan Bencana**, dan **Perubahan Iklim**
7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam** dan **Transformasi Pelayanan Publik**



TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI